

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh fakta lapangan (data empiris) terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Ciri khas metode penelitian survey adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Mapolres) Wonogiri

3.1.2 Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Indonesia pada dasarnya lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, secara formal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibentuk bersamaan dengan pelantikan KAPOLRI tanggal 29 September 1945. Sedangkan tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari Bhayangkara, karena pada tanggal tersebut Polri keluar dari Departemen Dalam Negeri dan berada dibawah Presiden atau Perdana Menteri, kemudian Polri menjadi Kepolisian Nasional (INP).

Dengan keluarnya dekrit 5 Juli 1959, Presiden memaksakan gagasan untuk menyatu atapkan POLRI dengan TNI dengan membentuk ABRI yang terdiri dari

4 angkatan yaitu AD, AL, AU, AKRI. Dan mulai saat itulah intervensi politik ke tubuh Polri makin meningkat. Pada era orde baru ABRI benar-benar diintegrasikan dan ini bukan hanya sekedar pada tatanan struktural tetapi juga filosofi dan doktrinnya. Disamping dimarginalkan dengan anggaran yang terkecil dari lembaga apapun, juga tak ada bantuan dari luar negeri karena negara-negara donor memandang Polri sebagai angkatan perang.

Berdasar Tap MPR No VI dan VII tahun 2000 TNI dan Polri dipisahkan, TNI bertugas di bidang pertahanan sedangkan Polri bertugas di bidang keamanan. Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi

Lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai dasar utama perubahan instrumental merupakan langkah maju bagi organisasi dan personel Polri, karena UU tersebut bersifat mengikat sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku Polri yang dikategorikan menyimpang kiranya tidak perlu terjadi, karena telah diatur di dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Kepolisian Republik Indonesia, PP No. 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri, dan PP No. 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri. Dari praktek yang dilakukan, proses persidangan Kode Etik Kepolisian cukup transparan dan masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan.

Untuk mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional sesuai dengan tuntutan reformasi Presiden RI mengeluarkan Keppres No 54 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI dan dirumuskan paradigma baru Polri dalam buku biru "Reformasi Menuju Polri yang Profesional".

Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) terdapat dalam lampiran "C" Kep. Kapolri No Pol : KEP/ 54/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, disingkat Polres, adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

3.1.3 Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Visi

Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak hukum

yang professional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety*, dan *peace*), sehingga masyarakat terbebas dari segala gangguan baik psikis maupun fisik.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *pre-emptif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan, serta kepatuhan hukum masyarakat
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara Kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma atau nilai yang berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam
- g. Memelihara soliditas institusi
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat atau wilayah Indonesia

- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia

3.1.4 Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat- surat ijin atau keterangan, sesuai aturan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan- satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
4. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus meliputi VIP,

pariwisata dan obyek vital atau khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

5. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
6. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
7. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang- undangan dan terjalinnya hubungan Polri- masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
8. Pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh social masyarakat dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis. koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.

9. Fungsi- fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

3.1.5 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kepolisian Resort (Polres) berdasar Surat Keputusan Kapolri No 54/ X/2002 terdiri dari :

1. Unsur pimpinan :
 - a. Kepala Polres, disingkat Kapolres
 - b. Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres
2. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf :
 - a. Bagian operasi , disingkat Bagops
 - b. Bagian pembinaan kemitraan, disingkat Bagbinamitra
 - c. Bagian administrasi, disingkat Bagmin
3. Unsur pelaksanaan staf khusus dan pelayanan:
 - a. Urusan telekomunikasi dan informatika, disingkat Urtelematika
 - b. Unit pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin , disingkat unit P3D
 - c. Tata usaha dan urusan dalam, disingkat Taud
4. Unsur pelaksana utama :
 - a. Sentra pelayanan kepolisian, disingkat SPK
 - b. Satuan intelegen keamanan, disingkat Satintelkam
 - c. Satuan reserse kriminil, disingkat Satreskrim

- d. Satuan Samapta, disingkat Satsamapta
- e. Satuan lalu lintas, disingkat Satlantas

Pada wilayah tertentu susunan organisasi Polres dapat dikembangkan dengan pembentukan satuan fungsi sebagai berikut :

1. Pada unsure pelaksana staf khusus dan pelayanan: Seksi kedokteran dan kesehatan, disingkat Sidokkes.
2. Pada unsure pelaksana utama :
 - a. Satuan narkotika dan obat berbahaya lainnya, disingkat Satnarkoba.
 - b. Satuan pengamanan obyek khusus, yang dapat berupa satuan pengamanan obyek vital, disingkat Sat- Pamobvit atau satuan pengamanan pariwisata, disingkat Sat-Pam Pariwisata.
 - c. Satuan atau unit polisi perairan, disingkat Satpolair atau Unit Polair sesuai kebutuhan.

3.1.6 Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

3.1.6.1 Unsur Pimpinan

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (KAPOLRES)
 - a. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda
 - b. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan- satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort
(WAKAPOLRES)

- a. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres.
- b. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas- tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3.1.6.2 Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

1. Bagian Operasi (BAGOPS)

- a. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
- c. Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops, disingkat Kabagops, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dibawah kendali Wakapolres.

d. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional, disingkat Kasubbagbinops
- 2) Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan, disingkat Kasubbagwattah

2. Bagian Pembinaan Kemitraan (BAGBINAMITRA)

- a. Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan- satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial/ kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang- undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri- masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
- c. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra, disingkat Kabagbinamitra, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dibawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagbinamitra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- 1) Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat, disingkat Kasubbagbimmas.
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama, disingkat Kasubbagbinkerma
- 3) Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat, disingkat Pahumas

3. Bagian Administrasi (BAGMIN)

- a. Bagmin adalah unsure pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistic.
- c. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin, disingkat Kabagmin, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagmin dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bantu oleh :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, disingkat Kasubbagren
 - 2) Kepala Sub Bagian Personel, disingkat Kasubbagpers
 - 3) Kepala Sub Bagian Pelatihan, disingkat Kasubbaglat
 - 4) Kepala Sub Bagian Logistik, disingkat Kasubbaglog.

3.1.6.3 Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

1. Urusan Telekomunikasi dan Informatika (URTELEMATIKA)

- a. Urtelematika adalah unsure pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
 - c. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika, disingkat Kaur Urtelematika yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
2. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (UNIT P3D)
- a. Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada dibawah Kapolres
 - b. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
 - c. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D, disingkat Kanit P3D, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
3. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (URDOKKES)
- a. Urdokkes adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dalam pembinaan organisasi Polri.

- b. Urdokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
 - c. Urdokkes dipimpin oleh Kepala Urdokkes, disingkat Kaurdokkes, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres.
4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)
- a. Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres
 - b. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materil atau logistic di lingkungan Pusdalops.
 - c. Taud dipimpin oleh Kepala Taud, disingkat Kataud, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

3.1.6.4 Unsur Pelaksana Utama

1. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
 - a. SPK adalah unsure pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*plug* atau *shift*) yang berada di bawah Kapolres

- b. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.
- c. Masing- masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK, disingkat KSPK, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari- hari di bawah kendali Kabagops.

2. Satuan Intelejen Keamanan (SATINTELKAM)

- a. Satintelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres
- b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social politik, masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/ Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

- c. Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam, disingkat Kasatintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres.
 - d. Pada Polres tipe “A1” dan “A2” . Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala satuan Intelkam, disingkat Wakasatintelkam.
 - e. Satintelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah unit.
3. Satuan Reserse Kriminil (SATRESKRIM)
- a. Satreskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.
 - c. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim, disingkat Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab pada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

- d. Pada Polres tipe “A1” dan A2”, Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reskrim disingkat Wakasat Reskrim.
 - e. Satreskrim terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
4. Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya Lainnya (SATNARKOBA)
- a. Satnarkoba merupakan unsure pelaksana utama pada Polres tipe “A1” dan “A2” dan “B1” yang merupakan pemekaran dari Satreskrim dan berada dibawah Kapolres.
 - b. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelesaian dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban atau penyalahgunaan Narkoba.
 - c. Satnarkoba dipimpin oleh Kepala Satnarkoba, disingkat Kasatnarkoba, yang bertanggung jawab pada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
 - d. Satnarkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
5. Satuan Samapta (SATSAMAPTA)
- a. Satsamapta adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres.

- b. Satsamapta bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Satsamapta dipimpin oleh Kepala Satsampata, disingkat Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dibawah kendali Wakapolres.
 - d. Pada Polres tipe “A1” dan “A2”, Kasatsamapta dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Samapta, disingkat Wakasatsamapta.
 - e. Satsamapta terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Satuan Setingkat Kompi atau Peleton Pengendalian Massa, serta sejumlah unit.
6. Satuan Pengamanan Obyek Vital (SATPAMOBVIT)
- a. Sat-Pamobvit adalah unsure pelaksana Polres tipe “A1” dan “A2” yang merupakan pemekaran dari Satsamapta dan berada di bawah Kapolres.
 - b. Sat-Pamobvit bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek vital yang meliputi proyek atau instalasi vital, VIP, kawasan industri dan obyek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.

- c. Sat- pamobvit dipimpin oleh Kepala Satpamobvit, disingkat Kasat Pamobvit, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Sat-pamobvit terdiri dari urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

7. Satuan Pengamanan Pariwisata (SATPAMWISATA)

- a. Sat- pamwisata adalah unsure pelaksana Polres yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.
- b. Sat- pamwisata bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan pariwisata yang meliputi wisatawan dan obyek wisata, termasuk mobilitas kunjungan wisatawan.
- c. Sat- pamwisata dipimpin oleh Kepala Satpamwisata, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Sat- pamwisata terdiri dari urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

8. Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)

- a. Satlantas adalah unsure pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan

patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- c. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satlantas, disingkat Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Pada Polres tipe "A1" dan "A2", Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas, disingkat Wakasat Lantas.
- e. Satlantas terdiri dari : Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

9. Satuan Kepolisian Perairan (SATPOLAIR)

- a. Satpolair atau Unit Polair adalah unsur pelaksana utama Polres wilayah perairan yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.
- b. Satpolair atau unit Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, termasuk penanganan pertama tindak pidana yang ditemukan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di laut (SAR)

- c. Satpolair atau Unit Polair dipimpin oleh Kepala Satpolair atau Unit Polair, disingkat Kasatpolair atau Kanit polair, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Satpolair terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit polair atau kapal.
- e. Unit Polair terdiri dari sejumlah kapal
- f. Pada wilayah perairan tertentu dapat dibentuk Pos Kepolisian Perairan, disingkat Pospolair, yang jika menyangkut jabatan perwira pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.

3.1.7 Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolres dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib :
 - a. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.

- c. Menjamin ketertiban administrasi keuangan atau perbendaharaan, baik yang diperoleh melalui program APBN maupun bantuan dari Pemda atau masyarakat, serta menggunakannya seoptimal dan seefisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- d. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

3. Kepala Bagian

- a. Kabagops adalah pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan atau tindakan operasional oleh segenap unsur pelaksana utama Polres.
- b. Kabagbinamitra adalah pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terimplementasikannya pendekatan pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas Polri dan terdorongnya segenap personil, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan social, untuk berperan membangun hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- c. Kabagmin adalah pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terselenggaranya proses penerimaan, pembinaan karier dan pengakhiran dinas setiap personel secara bersih, objektif dan adil (*fair*) dan terkelolanya materi/ fasilitas/ jasa secara bersih, tepat guna dan sesuai peraturan perundang- undangan.
- d. Kasat adalah pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terlaksanya pekerjaan sesuai prosedur dan petunjuk teknis

serta terwujudnya kinerja secara optimal dalam pelaksanaan fungsi binaannya dalam lingkungan Polres.

- e. Masing- masing pejabat dari sebagaimana tersebut diatas (dari a sampai d) wajib mengambil langkah- langkah pemantauan atau pengawasan dan tindakan *korektif*, baik terhadap bawahannya maupun pejabat atau personel lainnya yang terkait dalam lingkup Polres.
- f. Setiap pejabat atau personel Polres wajib mematuhi perintah atau petunjuk para pejabat sebagaimana tersebut diatas (butir e) sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Kapolres wajib mengendalikan koordinasi dengan kerjasama yang sebaik- baiknya dengan Bupati atau Walikota di pusat pemerintah daerah, khususnya yang berkenaan dan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

3.1.8 Fungsi Polres

1. Pembinaan fungsi dalam lingkup Polres meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya pekerjaan fungsi yang bersangkutan sesuai sistem, metode, dan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Pemberian dukungan (*back- up*) dalam bentuk bantuan kekuatan dan atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan tugas satuan fungsi yang bersangkutan.

- c. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan fungsi yang bersangkutan.
 - d. Pengajuan pertimbangan/ saran distribusi peralatan khusus dan/ atau penempatan/ pembinaan karier personel pengembangan fungsi yang bersangkutan.
2. Dalam pelaksanaannya, pembatasan lingkup tugas masing- masing satuan fungsi antar tingkatan organisasi didasarkan atas ketentuan tentang tataran atau pembagian kewenangan atau tanggung jawab yang ditetapkan oleh masing- masing pembina fungsi pada tingkat Mabes Polri, sesuai dengan kebijakan Kapolri.

3.1.9 Tipe Mapolres

Berdasar Keputusan Kapolri No Pol KEP/54/X/2002 Mapolres dapat dikelompokkan menjadi lima tipe, dimana pengelompokkannya ini berdasarkan jumlah personel yang ada dalam Mapolres tersebut dan juga berdasar keadaan wilayah pengawasannya (semakin luas/ besar/ ramai wilayah semakin banyak personelnnya). Lima tipe Mapolres yaitu :

1. Mapolres tipe A1 dengan personel 900 orang
2. Mapolres tipe A2 dengan personel 750 orang
3. Mapolres tipe B1 dengan personel 400 orang
4. Mapolres tipe B2 dengan personel 240 orang
5. Mapolres persiapan dengan personel 150 orang.

3.1.10 Sistem Penggolongan dan Kepangkatan

Dalam Kepolisian Republik Indonesia pembagian golongan keanggotaan dibedakan menjadi 4 golongan, yakni golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV. Golongan I adalah untuk Tamtama, golongan II untuk Bintara, Golongan III untuk Perwira Pertama dan golongan IV untuk Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi. Dalam setiap golongannya dibagi menjadi 6 tingkatan, sehingga dari a hingga f, kecuali untuk golongan III dan IV. Golongan III dibedakan menjadi 3 tingkatan (dari a hingga c), sedang golongan IV dibedakan menjadi 7 tingkatan (dari a hingga g).

1. Golongan I (satu) untuk Tamtama
 - a. Golongan Ia untuk pangkat Bhayangkara Dua (Bharada)
 - b. Golongan Ib untuk pangkat Bhayangkara Satu (Bharatu)
 - c. Golongan Ic untuk pangkat Bhayangkara Kepala (Bharaka)
 - d. Golongan Id untuk pangkat Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
 - e. Golongan Ie untuk pangkat Ajun Brigadir Polisi Satu (Abripta)
 - f. Golongan If untuk pangkat Ajun Brigadir Polisi (Abrip)
2. Golongan II (dua) untuk Bintara
 - a. Golongan IIa untuk pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda)
 - b. Golongan IIb untuk pangkat Brigadir Polisi Satu (Bripta)
 - c. Golongan IIc untuk pangkat Brigadir Polisi (Brigadir)
 - d. Golongan IId untuk pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka)
 - e. Golongan IIe untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA)
 - f. Golongan IIf untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)

3. Golongan III (tiga) untuk Perwira Pertama

- a. Golongan IIIa untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA)
- b. Golongan IIIb untuk pangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU)
- c. Golongan IIIc untuk pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP)

4. Golongan IV (empat) untuk Perwira Menengah dan Perwira Tinggi

a. Perwira Menengah

- 1) Golongan IVa untuk pangkat Komisaris Polisi (Kopol)
- 2) Golongan IVb untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
- 3) Golongan IVc untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (KBP)

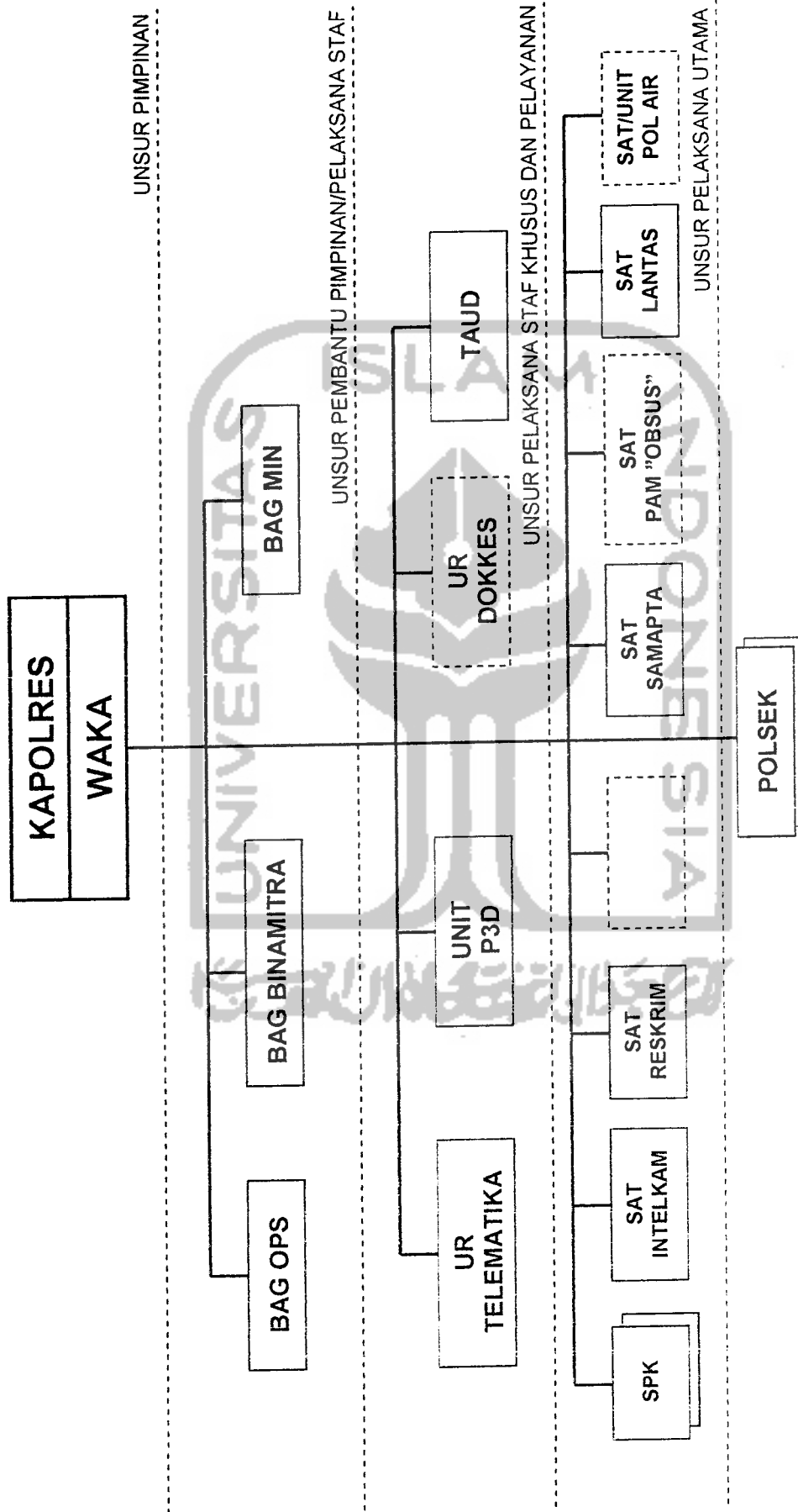
b. Perwira Tinggi

- 1) Golongan IVd untuk pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)
- 2) Golongan IVe untuk pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)
- 3) Golongan IVf untuk pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen)
- 4) Golongan IVg untuk pangkat Jenderal Polisi (Jenderal)

3.1.11 Struktur Organisasi Polres

Berikut ini adalah struktur organisasi Polres berdasar lampiran "C" Kep Kapolri KEP 54/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002.

STRUKTUR ORGANISASI POLRES



[] HANYA PADA POLRES WILAYAH TERTENTU
 * DAPAT BERBENTUK OBJEK WITAL ATAU PAM
 PARWISATA PADA POLRES WILAYAH KOTA BESAR

Gambar 3
Struktur Organisasi Polres

3.2 Variabel Penelitian

Identifikasi variabel data dilakukan untuk menjelaskan variabel- variabel yang dimaksud dalam penelitian ini. Variabel- variabel yang dimaksud adalah :

1. Variabel bebas (*Independence Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain, dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah variabel kompensasi, dimana X_1 adalah kompensasi financial dan X_2 adalah kompensasi non financial.

2. Variabel terikat (*Dependence Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel terikat adalah variabel kinerja anggota kepolisian pada Mapolres Wonogiri.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan secara terperinci variabel- variabel yang dimaksud dalam penelitian ini , yang terdiri dari :

1. Kompensasi Finansial (X_1)

Adalah bentuk kompensasi yang bisa dinilai dengan materi atau bisa berupa financial yang dirasakan oleh anggota organisasi

- a. Gaji pokok

Gaji pokok yang dimaksud disini menggambarkan input yang dimiliki oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi pada setiap bulannya.

Beberapa indikator dari gaji ini adalah :

- 1) Persepsi karyawan terhadap kelayakan gaji yang diterima
- 2) Persepsi karyawan terhadap gaji yang diterima berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan beserta keluarga.
- 3) Persepsi karyawan terhadap pemotongan gaji apakah masih dalam batas kewajaran

b. Uang lauk pauk

Salah satu bentuk kompensasi yang berupa pemberian uang untuk lauk pauk atau sejenis dengan uang makan yang diberikan kepada anggota organisasi (POLRI)

- 1) Persepsi anggota organisasi atas kelayakan pemberian uang lauk pauk
- 2) Persepsi anggota organisasi atas kecukupan pemberian uang lauk pauk

c. Bonus

Bonus adalah pembayaran- pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi tujuan kinerja. Bonus dapat didasarkan pada pencapaian sasaran obyektif atau penilaian subyektif.

Indikator dari bonus :

- 1) Jumlah yang diterima apakah wajar atas pekerjaan tersebut
- 2) Jumlah yang diterima apakah sebanding atas resiko pekerjaan tersebut

d. Tunjangan

Tunjangan (*benefits*) adalah pembayaran- pembayaran dan jasa- jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Efek utama atas tunjangan kompensasi adalah menahan karyawan atau anggota organisasi atas basis jangka panjang. Tunjangan yang dimaksud disini adalah tunjangan istri dan tunjangan anak. Indikator dari tunjangan yaitu :

- 1) Persepsi anggota organisasi terhadap tunjangan istri yang diterima apakah layak
- 2) Persepsi anggota organisasi terhadap tunjangan istri yang diterima apakah cukup
- 3) Persepsi anggota organisasi terhadap tunjangan anak yang diterima tersebut apakah layak
- 4) Persepsi anggota organisasi terhadap tunjangan anak yang diterima apakah cukup

2. Kompensasi Non Finansial (X₂)

Kompensasi non financial adalah kompensasi yang diberikan dalam bentuk non materi, yang termasuk didalamnya yaitu :

a. Penghargaan yang bersifat interpersonal

Merupakan penghargaan yang diterima atau dirasakan karyawan karena bekerja di suatu organisasi. Indikatornya yaitu :

- 1) Hubungan yang baik dengan atasan
- 2) Hubungan yang baik dengan rekan sekerja

3) Kemudahan dalam menjalin hubungan social karena pekerjaan tersebut

4) Status social yang diperoleh karena pekerjaan tersebut

b. Penghargaan yang mendukung pertumbuhan individu

Penghargaan ini bersifat intrinsic, merupakan penghargaan yang akan diperoleh secara langsung berdasarkan kinerja. Indikatornya yaitu :

1) Tantangan dalam pekerjaan, setiap pekerjaan atau kasus ada tantangannya sendiri-sendiri bagaimana cara menyelesaikannya

2) Tanggung jawab, dalam pembagian tugas ada tanggung jawab yang diemban setiap personilnya ataupun tiap kelompok.

3) Otonomi, adanya kebebasan dari tiap individu untuk berusaha menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan caranya sendiri.

3. Kinerja Anggota Organisasi (Y)

Kinerja merupakan hasil yang diinginkan dari suatu perilaku. Karena dalam lingkup Polri ukuran kinerja adalah bisa melaksanakan tugasnya masing-masing, padahal yang diteliti luas maka karena dengan segala keterbatasan tersebut penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan kualitas, kuantitas, keandalan dan kerjasama.

a. Kualitas kerja

Adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana penguasaan ketrampilan, kecepatan dalam bekerja, serta kerapihan hasil pekerjaan. Indikator dari kualitas kerja anggota organisasi yaitu :

- 1) Ketelitian dalam pelaksanaan tugas
- 2) Kerapian dalam pelaksanaan tugas
- 3) Anggota organisasi mempunyai ketrampilan khusus yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Anggota melaksanakan dengan cepat tanpa ada kesalahan prosedur

b. Kuantitas kerja

Adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas regular yang telah menjadi rutinitas bagi karyawan. Indikator dari kuantitas kerja anggota organisasi yaitu :

- 1) Anggota organisasi melaksanakan tugas regulernya dengan baik

c. Keandalan

Merupakan kemampuan dan keandalan dalam menjalankan peraturan, memiliki inisiatif dan disiplin. Indikator dari keandalan adalah :

- 1) Anggota organisasi mengambil inisiatif dalam memecahkan persoalan
- 2) Anggota organisasi dalam melakukan tugasnya dengan kedisiplinan

d. Kerjasama

Merupakan ukuran bagaimana anggota organisasi menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang lain atau sebaliknya untuk tujuan-tujuan organisasional..Indikator dari kerjasama yaitu :

- 1) Anggota organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya melakukan koordinasi dengan atasan.
- 2) Anggota organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya melakukan koordinasi dengan rekan sekerja.

- 3) Anggota organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar lingkup organisasi.

4. Demografi

1) Usia

- a. Kurang dari 27 tahun c. 37 – 46 tahun
b. 27 – 36 tahun d. Lebih dari 46 tahun

2) Pendidikan

- a. SMP
b. SMA
c. Sarjana

3) Jenis kelamin

- a. Laki- laki b. Perempuan

4) Status Pernikahan

- a. Belum menikah
b. Menikah
c. Janda/ duda

5) Masa kerja

- a. Kurang dari 11 tahun c. 21 – 30 tahun
b. 11 – 20 tahun d. Lebih dari 30 tahun

6) Golongan

- a. Golongan 2a – 2c
b. Golongan 2d – 2f
c. Golongan 3a – 3c

7) Jumlah tanggungan

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Tidak ada | c. 3 – 4 orang |
| b. Kurang dari 3 orang | d. Lebih dari 5 orang |

3.4 Instrumen atau Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, digunakan model angket tertutup. Dalam menetapkan validitas suatu instrumen pengukuran adalah menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Jika hasil uji menghasilkan derajat yang tinggi maka instrumen pengukuran yang digunakan adalah valid. Dalam penelitian ini alat uji instrument yang digunakan adalah *korelasi product moment*. Yang rumusnya adalah sebagai berikut (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989; 139) :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana : n = Jumlah responden

X = Skor butir

Y = Skor total

XY = Skor butir x skor total

Uji Realibilitas (Husein Umar, 2003; 87) rumusnya :

$$X_0 = X_t + X_e$$

Dimana : X_0 = angka yang diperoleh (*obtained score*)

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *Product Moment*. Analisis korelasi ini berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Simbol dari besaran korelasi adalah r yang disebut koefisien korelasi, sedang symbol parameternya ρ (rho)

Dalam uji validitas ini mengambil 30 responden sebagai syarat minimal sampel uji coba dan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan uji validitas, maka dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan item lainnya. Hasil dinyatakan valid atau sah apabila r hitung $>$ r tabel, dengan taraf signifikansi 5%. Setelah melakukan uji coba instrument pada 30 responden, dari jumlah butir pernyataan sebanyak 55 butir terdiri dari 16 butir tentang kompensasi financial diluar tunjangan, 8 butir untuk variabel kompensasi financial yang berupa tunjangan (4 butir tunjangan anak dan 4 butir tunjangan istri/ suami), 14 butir mengenai kompensasi non financial dan 17 butir mengenai kinerja. Dari 55 butir dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrument penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Dari tabel 3.1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa dari 24 butir pertanyaan variabel kompensasi financial dinyatakan valid atau sah untuk digunakan dalam penelitian. Hal ini karena dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) yaitu $(n-2) = 30-2 = 28$ didapat nilai r tabel 0,2407 lebih kecil dari r hitung

Tabel 3.1
 Hasil Analisis Validitas Butir
 Untuk Pertanyaan Variabel Kompensasi Finansial

No	Kuesioner	(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Butir 1	0,7360	0,2407	Valid
2	Butir 2	0,6795	0,2407	Valid
3	Butir 3	0,6575	0,2407	Valid
4	Butir 4	0,7812	0,2407	Valid
5	Butir 5	0,5454	0,2407	Valid
6	Butir 6	0,2482	0,2407	Valid
7	Butir 7	0,3390	0,2407	Valid
8	Butir 8	0,6377	0,2407	Valid
9	Butir 9	0,8156	0,2407	Valid
10	Butir 10	0,7844	0,2407	Valid
11	Butir 11	0,3494	0,2407	Valid
12	Butir 12	0,6988	0,2407	Valid
13	Butir 13	0,5233	0,2407	Valid
14	Butir 14	0,3375	0,2407	Valid
15	Butir 15	0,3194	0,2407	Valid
16	Butir 16	0,3281	0,2407	Valid
17	Butir 17	0,7750	0,2407	Valid
18	Butir 18	0,9191	0,2407	Valid
19	Butir 19	0,9218	0,2407	Valid
20	Butir 20	0,8996	0,2407	Valid
21	Butir 21	0,9561	0,2407	Valid
22	Butir 22	0,9274	0,2407	Valid
23	Butir 23	0,9093	0,2407	Valid
24	Butir 24	0,7696	0,2407	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran C, hlm. 144-145)

Dari tabel 3.2 di bawah ini dapat diketahui bahwa 14 butir pertanyaan untuk Variabel kompensasi non financial dinyatakan valid atau sah untuk digunakan dalam penelitian. Hal ini karena dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) yaitu $(n-2) = 30-2 = 28$ didapat nilai r tabel 0,2407 lebih kecil dari r hitung.

Tabel 3.2
 Hasil Analisis Validitas Butir
 Untuk Pertanyaan Variabel Kompensasi Non Finansial

No	Kuesioner	R _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	Butir 1	0,2679	0,2407	Valid
2	Butir 2	0,6114	0,2407	Valid
3	Butir 3	0,5312	0,2407	Valid
4	Butir 4	0,7102	0,2407	Valid
5	Butir 5	0,5950	0,2407	Valid
6	Butir 6	0,6010	0,2407	Valid
7	Butir 7	0,2606	0,2407	Valid
8	Butir 8	0,6836	0,2407	Valid
9	Butir 9	0,3067	0,2407	Valid
10	Butir 10	0,4649	0,2407	Valid
11	Butir 11	0,5047	0,2407	Valid
12	Butir 12	0,5012	0,2407	Valid
13	Butir 13	0,6417	0,2407	Valid
14	Butir 14	0,6134	0,2407	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran C, hlm.146-147)

Dari tabel 3.3 berikut ini dapat diketahui bahwa 17 butir pertanyaan untuk Variabel kompensasi non financial dinyatakan valid atau sahih untuk digunakan dalam penelitian. Hal ini karena dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) yaitu $(n-2) = 30-2 = 28$ didapat nilai r tabel 0,2407 lebih kecil dari r hitung.

Tabel 3.3
 Hasil Analisis Validitas Butir
 Untuk Pertanyaan Variabel Kinerja

No	Kuesioner	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	Butir 1	0,3864	0,2407	Valid
2	Butir 2	0,29722	0,2407	Valid
3	Butir 3	0,5438	0,2407	Valid
4	Butir 4	0,7496	0,2407	Valid
5	Butir 5	0,7954	0,2407	Valid
6	Butir 6	0,4847	0,2407	Valid
7	Butir 7	0,6199	0,2407	Valid
8	Butir 8	0,7251	0,2407	Valid
9	Butir 9	0,9075	0,2407	Valid

No	Kuesioner	R _{hitung}	0,2407	Keterangan
10	Butir 10	0,5383	0,2407	Valid
11	Butir 11	0,6078	0,2407	Valid
12	Butir 12	0,8248	0,2407	Valid
13	Butir 13	0,7215	0,2407	Valid
14	Butir 14	0,7420	0,2407	Valid
15	Butir 15	0,7869	0,2407	Valid
16	Butir 16	0,2927	0,2407	Valid
17	Butir 17	0,4076	0,2407	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran C, hlm.147-148)

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan perkiraan *Cronbach's Alpha* yang menunjukkan bagaimana tingginya butir- butir dalam kuesioner berkorelasi atau berinteraksi.

Dalam uji reliabilitas ini mengambil 30 responden sebagai syarat minimal sampel uji coba dan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan uji reliabilitas, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan komputerisasi, program SPSS . Hasil dinyatakan reliable apabila skor korelasi antar masing- masing item dengan skor totalnya lebih dari r tabel yaitu 0,2407.

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	A	Keterangan
Kompensasi Finansial (X ₁)	0,8867	Reliabel
Kompensasi Finansial Tunjangan (X _{1.4})	0,9689	Reliabel
Kompensasi Non Finansial (X ₂)	0,8471	Reliabel
Kinerja (Y)	0,8921	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran B, hlm.)

Dari tabel 3.4 diatas, maka disimpulkan seluruh variabel dinyatakan reliable.

Karena r Alpha adalah positif dan lebih besar dari r tabel 0,2407.

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang diketahui kebenarannya dan akan menjadi dasar untuk dianalisis dalam penelitian. Untuk menguji bahwa hipotesis diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data- data yang ada di lapangan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu , dan selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan secara induktif. Dan akhirnya dapatlah kita memutuskan hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

1. Jenis Data

Jenis data dapat dibedakan menurut sumber data, pentingnya data , dan tipe atau sifat data.

a. Sumber Data

- 1) Data *internal*, yaitu data dari suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Berkenaan dengan penelitian ini menyangkut sejarah berdirinya organisasi tersebut, administrasi yang ada, dll.
- 2) Data *eksternal*, yaitu data dari luar organisasi yang dapat menggambarkan faktor- faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Data eksternal ini dibedakan menjadi 2 yaitu data *primer* dan data *sekunder*.
 - a) Data *primer*, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya.

- b) Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana data tersebut dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah dalam bentuk publikasi.

b. Pentingnya data

- 1) Data khusus, adalah data yang berisi dokumen yang berhubungan dengan penerapan program kompensasi dalam organisasi tersebut.
- 2) Data umum, adalah data yang berisi informasi umum yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan, meliputi : sejarah organisasi, lokasi organisasi, dan juga struktur organisasi yang bersangkutan..

c. Tipe atau Sifat Data

- 1) Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka, misalnya mengenai tingkat gaji, lama masa kerja, harga beras/ kg,dll.
- 2) Data kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk angka, jadi bisa berupa pernyataan misalnya: keamanan Indonesia mantap, utang perusahaan meningkat, dll.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan , digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan cara subjek yang diteliti mengisi angket yang bersifat tertutup , yang ada penilaian tersendiri dari 5 tipe poin jawaban yang diberikan. Penilaian diukur secara scoring berdasar skala *Likert*.

Tabel 3.5
Klasifikasi nilai untuk setiap jawaban pernyataan

No	Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu (R)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

b. Studi pustaka

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku- buku dan referensi pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sensus mencatat semua elemen yang diselidiki; jadi menyelidiki semua objek semua gejala, semua kejadian, atau peristiwa penelitian demikian disebut sensus, dan yang dihasilkan adalah nilai karakteristik sesungguhnya. Kumpulan seluruh elemen itu dinamakan populasi. Sampel adalah sebagian kecil dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian itu. (J Supranto, 1997, hlm. 56).

Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah anggota kepolisian pada Mapolres Wonogiri Jawa Tengah, sedangkan sampel akan diambil dengan menggunakan *stratified sampling*, baru kemudian pada unsure pelaksana utama menggunakan *random sampling*. Berdasarkan metode ini maka pengambilan sampelnya dengan memperhatikan strata- strata dalam populasi yang homogen,

menaksir karakteristik populasi dari sampel yang dipilih, dan obyektifitas taksiran yang dihasilkan dapat dijelaskan. Dalam hal ini populasi secara keseluruhan telah dibedakan menjadi 4 unsur penugasan.

Untuk menentukan jumlah sampel yang dikehendaki sebagai responden, menurut Suharsimi Arikunto (1983, hlm. 94) apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10%- 15% , atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak- tidaknya dari :

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, biaya, dan tenaga
2. Sempitnya luas wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi (Sutrisno Hadi, 1995, hlm. 73).

Seluruh populasi pada Mapolres Wonogiri Jawa Tengah ada 292 orang terdiri dari 252 Polri dan 40 tenaga sipil. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 100 responden anggota Polri yang dipilih secara *probability sampling*.

Tabel 3.6
Perbandingan Jumlah Populasi dan Sampel

Jenis unsure	Populasi	Sampel
Unsur pimpinan	2	0
Unsur pembantu pimpinan atau pelaksana staf	38	38
Unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan	19	19
Unsur pelaksana utama	193	43
Jumlah	252	100

Sumber : Mapolres Wonogiri, 2005

Pada unsur pimpinan tidak ada sampel dikarenakan segala keterbatasan waktu dan kesibukan pimpinan. Pada unsur pembantu pimpinan atau pelaksana staf jumlah sampel sama dengan populasi yaitu 38 responden. Pada unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan jumlah sampel sama dengan populasi yaitu 19 responden. Pada unsur pelaksana utama populasi sebesar 193 diambil sampel sebanyak 43 responden.

3.7 Alat Analisis

1. Analisa deskriptif

Merupakan analisis dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat. Data tersebut biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data di tabel tersebut.

2. Analisis kualitatif

Merupakan teknik analisis dengan menggunakan teknik statistic. Hasil akhir dari analisis ini biasanya dipergunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya. Menggunakan regresi linier berganda dan analisis Kai Kuadrat.

a. Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda, merupakan kecenderungan atau gambaran pengaruh antara data- data yang relevan dimana terdapat faktor dependen dan independen. Digunakan untuk mengetahui pola pengaruh positif maupun negative antara satu variabel dengan variabel lainnya. Langkah- langkah dalam analisis ini meliputi :

1) Adapun rumus yang digunakan (Djarwanto dan Pangestu Subagyo,

1998, hlm. 309) yaitu :

Bentuk umum persamaan regresi :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Y = Kinerja anggota organisasi

X₁ = Komponen financial

X₂ = Komponen non financial

2) Untuk membuktikan kebenaran hipotesis 1, digunakan uji F, yaitu

dengan menguji koefisien regresi berganda secara serentak

sehingga dapat diketahui seberapa jauh variabel kompensasi X₁, X₂

dapat mempengaruhi Y. Uji statistiknya adalah uji statistic F.

Hipotesis yang diajukan yaitu :

b_1 . $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

b_2 . $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka regresi dinyatakan signifikan. Hal ini terjadi hubungan antara kompensasi dengan kinerja.

3) Untuk menguji hipotesis II digunakan uji t, yaitu digunakan untuk pengujian koefisien regresi berganda secara parsial. Hipotesis yang diajukan yaitu :

c_1 . $H_0 : b_1 = 0$ tidak ada pengaruh yang berarti secara parsial pada masing-masing variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

C_2 . $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, ada pengaruh yang berarti secara parsial pada masing-masing variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila pada $\alpha = 0,05$ t hitung lebih besar dari t tabel, maka regresi dinyatakan signifikan. Hal ini berarti terjadi hubungan antara system kompensasi secara financial dengan kinerja, dengan asumsi kompensasi non financial dianggap konstan (*ceteris paribus*), atau antara system kompensasi non financial dengan

kinerja karyawan dengan asumsi kompensasi secara finansial dianggap konstan (*ceteris paribus*).

Selanjutnya dicari koefisien determinasi parsial (r_2) dari masing-masing variabel bebas. Hal tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas secara mandiri terhadap variabel tidak bebas. Semakin besar r_2 suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominan variabel bebas tersebut terhadap variabel tidak bebas.

2. Analisis Kai Kuadrat

Pengujian faktor demografi dapat dipergunakan pengaruh yang signifikan, untuk mencari hubungan antara variabel-variabel penelitian yang digolongkan dalam dua kategori atau lebih juga dalam rangka untuk pengujian hipotesis maka akan digunakan analisa yang biasa disebut kai kuadrat.

Rumus kai kuadrat (Zainal Mustafa, 1992, hlm. 89)

$$X^2 = \sum \frac{(f_0 - f_h)^2}{f_h}$$

Dimana : X^2 = Harga kai kuadrat

f_h = Frekwensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan frekwensi yang diharapkan

f_0 = Frekwensi yang diharapkan (observasi)

Untuk mencari rumus f_h digunakan rumus berikut. Dalam kaitan uji kaid kuadrat sebagai alat analisa yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

$$f_h = \frac{(\text{total frekwensi sebaris}) (\text{total frekwensi sekelompok})}{\text{total sampel}}$$

Apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka langkah selanjutnya setelah harga χ^2 diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Mencari derajat kebebasan (db) pembilang, dengan menggunakan rumus berikut :

$$db = (r-1) (k-1)$$

dimana : r = jumlah baris

k = jumlah kolom

- b. Menentukan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini ditentukan 95 % atau 0,05

- c. Mencari harga χ^2 tabel, dengan cara melihatnya pada tabel

- d. Menentukan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima

H_0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor demografi dengan kinerja anggota Polri pada Mapolres Wonogiri

H_a = terdapat hubungan yang signifikan antara faktor demografi dengan kinerja anggota Polri pada Mapolres Wonogiri.

Tolak H_0 , terima H_a jika $\chi^2 > \chi^2_{\text{tab}} \{ (\quad), (r-1), (k-1) \}$

Terima H_0 tolak H_a jika $\chi^2 < \chi^2_{\text{tab}} \{ (\quad), (r-1), (k-1) \}$

3. Koefisien Kontingensi

Jika setelah menggunakan analisis kai kuadrat ternyata terdapat hubungan, maka untuk mengetahui derajat hubungan kedua variabel penelitian apakah derajat hubungan erat atau tidak maka terlebih dahulu dicari suatu angka atau koefisien yang biasa disebut dengan koefisien kontingensi (KK) dan besarnya harga KK yang diperoleh nantinya harus dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum (KK maks).

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}}$$

$$\text{Dimana } C \text{ maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan = C = Koefisien Kontingensi

X^2 = Nilai Kai Kuadrat

n = banyaknya sampel

m = nilai minimal antara banyaknya baris dan kolom